
**ANALISIS PRAKTIK SUAP DI KALANGAN APARAT NEGARA:
STUDI KASUS DI INDONESIA**

**Slamet Muliono Redjosari¹, Amanda Rachmalia², Ananda Salma Nabila³,
Assyjaratuh Aslin Nuronniyah⁴**
smuliono@uinsa.ac.id¹, amandarachmalia9@gmail.com², nabilasalma049@gmail.com³,
anuronniyah@gmail.com⁴
UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Banyaknya berbagai kasus di Indonesia tentang kenegaraan dan keadilan penegak hukum dalam beberapa kasus di masyarakat seperti penyuapan serta banyaknya para aparat negara dan penegak hukum yang semakin lalai jauh dari kebenaran. Beberapa kasus suap menyuap yang banyak terjadi di Indonesia ditunaikan oleh aparatur negara. Suap terjadi karena lalainya dalam pengawasan aparat hukum. Selain itu suap juga terjadi karena lalainya aparat hukum dalam memperoleh keuntungan yang menggiurkan dalam sebuah kasus. Dicurigainya kasus suap diketahui dari beberapa hal seperti mencoloknya gaya hidup dan tingkah laku yang sangat berbeda. Disitulah terdapat banyak perbedaan dari beberapa hal tertentu yang bahkan dapat menjadi sorotan publik. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau salah satu kasus penyuapan di Indonesia yang dilakukan oleh seorang penegak hukum. Seorang penegak hukum yang dipercayai menyelesaikan kasus-kasus di Indonesia dengan mudah dan nikmatnya berperan sebagai seorang perantara antara hakim dan juga pengacara dalam sebuah kasus penganiayaan serta pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pengusaha muda. Selain itu juga masih banyak kasus suap lainnya lagi terkait kasus suap penanganan perkara maupun gratifikasi. Segala hal yang terkait dengan kasus praktik suap ini menjadi informasi penting bagi penulis sebagai bahan penelitian agar dapat menjadi edukasi yang tepat sebagai bahan contoh pengetatan undang-undang di Indonesia agar lebih baik dari sebelumnya.

Kata Kunci: Suap-Menyuap, Aparat Hukum, Kasus.

Abstract

The number of various cases in Indonesia regarding the state and law enforcement justice in several cases in society such as bribery and the number of state officials and law enforcers who are increasingly negligent are far from the truth. Several bribery cases that often occur in Indonesia are carried out by state officials. Bribery occurs due to negligence in the supervision of legal officials. Apart from that, bribery also occurs because legal officials are negligent in obtaining lucrative profits in a case. The suspicion of a bribery case is known from several things, such as the strikingly different lifestyle and behavior. That's where there are many differences in certain things that can even become the public spotlight. This research aims to review one case of bribery in Indonesia committed by a law enforcer. A law enforcer who is trusted to solve cases in Indonesia easily and enjoys his role as an intermediary between judges and lawyers in a case of abuse and murder committed by a young businessman. Apart from that, there are also many other bribery cases related to cases of bribery in case handling and gratification. Everything related to this bribery practice case is important information for the author as research material so that it can be used as appropriate education as an example of tightening laws in Indonesia to make it better than before.

Keywords: Bribery, Law Enforcement Officials, Case.

PENDAHULUAN

Dari banyaknya kasus suap yang terjadi di Indonesia ini. Bukan hal yang mengejutkan bagi warga Negara Indonesia yang mendapati banyak dari bagian pemerintahan negaranya mendapat masalah kasus korupsi apalagi suap. Demikian terjadi sebab banyak dari bagian pemerintahan negara yang juga ikut andil mengikuti kebiasaan buruk ini. Kebiasaan yang semakin lama menjadi tidak memiliki batasan bahkan sudah dipandang sebagai sesuatu yang lumrah terjadi dikalangan pemerintahan negara. Pada 2024 ini setelah beberapa waktu setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024, beberapa dari banyaknya kasus suap adalah kasus tertangkapnya Zarof Ricar (mantan Mahkamah Agung RI) dari artitel yang dipublikasikan oleh BBC News Indonesia (2024) pada kamis 24 Oktober 2024 telah ditetapkannya Zarof Ricar sebagai tersangka sehari sesudahnya. Dari berita yang tertulis pada Kompas.com (2024) Zarof Ricar Mahkamah Agung turut andil dalam kasasi kasus penganiayaan dan pembunuhan seorang pengusaha di Surabaya. Awal dari kasus ini berfokus pada penganiayaan dan pembunuhan, karena terjadi keanehan dalam kasus ini dan setelah diselidiki ternyata didapatkan sebuah fakta bahwa terjadi penyuapan dalam kasus ini. Dari sini fokus terhadap kasus pembunuhan justru menjadi teralihkan pada kasus penyuapan. Kasus yang terjadi pada akhir tahun 2023 dan baru terungkap adanya tindak penyuapan pada tahun 2024. Kasus suap lainnya yang juga dilakukan oleh aparaturnegara adalah kasus Hasbi Hasan seorang sekeretaris MA dan seorang mantang Komisaris Independen Wijaya Karya yang didakwa menerima suap dari penanganan kasus di MA. Dari kisah penyuapan Zarof Ricar dan Hasbi Hasan ini penulis juga akan membeberkan kasus-kasus penyuapan lain yang dilakukan oleh para aparaturnegara di Indonesia. Sebagai bentuk upaya peningkatan sistem kerja undang-undang negara dan unjuk suara atas banyaknya kasus suap yang terjadi di Indonesia akan tetapi lambat dalam aksi penanganan.

METODE

Metode yang terdapat pada kepenulisan jurnal ini adalah metode kualitatif. Metode Kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, sikap, keyakinan, dan persepsi (Qotrunc A 2019) dengan mengumpulkan data-data dan memahami setiap kejadian yang terkandung di dalam berita yang bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam. Dalam menganalisis kasus suap -menyuap aparat negara, penulis menggunakan kumpulan data Studi Literatur yang terdiri dari: artikel, jurnal, website pendidikan, dan analisis video (J. Nabel.A.P dan Moch Ali M. 2020). Contohnya yaitu dengan menggunakan Analisis Isi (content analysis) yaitu memahami dan menganalisis isi dari berita-berita yang terkandung dalam jurnal, artikel, dan berita-berita yang terkandung di dalam social media. Langkah-langkah Analisis Isi (content analysis) dalam pendekatan Analisis Isi adalah dengan memilih metode Analisis dan mengumpulkan data yang sesuai. Yaitu memilih metode Analisis yang sesuai dengan tema dari data tersebut, dan dengan mengumpulkan semua data-data (jurnal-jurnal website, artikel) dan berita yang terkandung di dalam social media yang bisa di susun menjadi data yang akurat. Selanjutnya mempersiapkan data untuk di analisis. Dengan memeriksa data, kelengkapan data, dan menghilangkan data-data yang tidak relevan. Setelah menyiapkan data-data yaitu menyusun data-data yang sudah di lakukan analisis. Yaitu dengan menentukan data-data mana yang lebih relevan untuk di jadikan sebuah jurnal. Terakhir tidak lupa untuk di diskusikan dengan teman. Yaitu dengan memberikan saran dan solusi antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya, mana yang lebih

akurat untuk di jadikan sebagai penjelasan. Terakhir kita perlu menyimpulkan hasil. Yaitu dengan mengumpulkan hasil rangkuman Analisis secara singkat dan jelas, dan di jadikan penjelasan yang rinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suap merupakan salah satu modus yang kerap digunakan dalam mempengaruhi due process of law, ditinjau secara kriminologis terjadi melalui adanya interaksi sosial antara pemberi suap dan penerima suap. Peristiwa suap menyuap dapat terjadi bila terdapat hubungan kepentingan antara pemberi suap dan penerima suap (Muhammad Mustofa, 2013). Pihak pemberi suap adalah pihak yang mempunyai kepentingan dalam berhubungan dengan pihak penerima suap. Pihak penerima suap mempunyai hubungan kepentingan dengan pemberi suap karena ia merupakan pihak yang mempunyai otoritas untuk dapat memenuhi atau tidak memenuhi kepentingan pemberi suap. Oleh karena itu suap-menyuap disebut juga sebagai kejahatan transaksional.’ Terdapat transaksi untung rugi antara pemberi suap dengan penerima suap. Dalam sistem peradilan, hubungan transaksional terjadi dalam proses penyelesaian perkara. Orang-orang yang berperkara adalah pihak peminta keadilan, sedangkan aparat dalam sistem peradilan pidana adalah pihak yang mempunyai otoritas untuk memberikan keadilan terhadap orang-orang yang berperkara. Pihak-pihak yang dapat terlibat dalam transaksi penyelesaian perkara adalah semua pihak yang mempunyai peran dalam jalannya proses perkara. Ia dapat merupakan pengacara, polisi, jaksa, panitera, hakim, maupun pencari keadilan sendiri. Dalam kasus Anggoro, ia merupakan pihak yang terkena perkara yang berusaha mempengaruhi jalannya perkara. Peristiwa semacam ini kemudian disebut sebagai mafia peradilan. Selain pihak-pihak tersebut, ada pula pihak yang memposisikan diri untuk membantu pihak yang mempunyai perkara agar perkaranya dapat diselesaikan sesuai dengan kehendak orang yang berperkara. Pihak ini dikenal sebagai makelar kasus. Makelar kasus, dapat merupakan pihak yang memang mempunyai peran dalam proses acara peradilan, seperti pengacara, polisi, jaksa, dan hakim, dapat pula orang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi pemeran acara peradilan. (Muhammad Mustofa, 2013)

Sanksi terhadap pelaku tindak pidana suap secara yuridis telah tertuang dalam beberapa regulasi yaitu KUHP, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan aturan lainnya. Namun demikian, pemberian sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari faktor-faktor internal dan eksternal kehidupan masyarakat. Artinya, sanksi yang diterima oleh para pelaku suap juga didasarkan pada pertimbangan seorang hakim melalui berbagai perspektif mulai dari fakta, kondisi atau situasi, dan pertimbangan untuk memberatkan pengenaan sanksi pidana. Menurut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej alasan yang menjadi dasar pemberat sanksi pidana dibagi menjadi empat yaitu pertama, perbarengan atau *concurus* dimana, seseorang dalam rentan waktu tertentu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Kedua, *recidive* yaitu tindak pidana yang dilakukan secara berulang, namun tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi sanksi pidana. Ketiga, dasar pemberatan sanksi pidana atas jabatan baik pelanggaran kewajiban, memakai kekuasaan jabatan, memanfaatkan kesempatan atas jabatan, dan menggunakan suatu sarana tertentu karena dasar jabatannya. Keempat, keadaan tertentu yang terdiri atas bencana alam, huru hara, dan wabah penyakit. (Rr. Halimatu Hira, 2021). Dan dalam artikel ini akan membahas beberapa kasus suap yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan sanksi pidana apa yang didapat pada para pelaku suap-menyuap disesuaikan dengan bagaimana suap-menyuap itu dilakukan oleh para pelaku.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis, penulis mendapatkan fakta dan bukti yang telah didapat dari berita dan artikel yang beredar dalam media online. Kasus

pertama yang dianalisis oleh penulis adalah kasus milik Zarof Ricar yang merupakan seorang mantan Mahkamah Agung yang seusai menjabat sebagai MA masih menjadi makelar suap vonis bebas dalam kasus seorang pengusaha yang menganiaya kekasihnya sendiri (Kiki Saputri & Ihsanuddin, 2024). Fokus utama kasus ini berawal dari klien makelar suap Zarof Ricar yang merupakan anak seorang mantan anggota komisi IV DPR RI yaitu Gregorius Ronald Tannur yang menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan kekasihnya pada Oktober 2023 lalu (Muhammad Zaenuddin, 2024). Setelah kasus ini ditangani dan hakim sempat memberi putusan vonis bebas pada Ronald Tannur (Zunita Putri, 2024), putusan ini mendapatkan bantahan dari keluarga korban karena merasa dirugikan oleh hakim PN Surabaya yang tidak dapat memberi keadilan. Diketahui bahwasannya terdapat praktek suap yang dilakukan oleh pihak keluarga tersangka kepada hakim yang menjadi sorotan Kejagung hingga Kejagung menetapkan hakim sebagai tersangka (Zunita Putri, 2024). Berawal dari sinilah fokus kejagung teralihkan pada praktek suap yang terjadi antara keluarga tersangka, hakim, dan beberapa individu lainnya.

Praktek suap ini diawali oleh ibu Ronald Tannur yaitu Meirizka yang meminta bantuan kepada Lisa Rahmat supaya anaknya mendapat vonis bebas. Dan Lisa Rahmat selaku pengacara meminta Zarof Ricar untuk dapat menjadi penghubung pada ke 3 hakim PN Surabaya yang mengadili kasus Ronald Tannur yaitu Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo (Anggi Muliawati, 2024). Pada 23 Oktober 2024 kejagung langsung menetapkan empat tersangka termasuk 3 hakim dan 1 pengacara dan disusul pada hari berikutnya Zarof Ricar langsung diamankan di hotel Le Meridien Bali. Dilanjut pada 25 Oktober sehari setelah penangkapan Zarof Ricar, kejagunganpun telah menyatakan Zarof Ricar sebagai tersangka (Lipsus Kumparan, 2024). Penanganan berikutnya kejagung langsung melakukan pengeledahan pada rumah mewah tiga lantai milik Zarof Ricar dan menemukan uang tunai sejumlah Rp. 920 Miliar dan emas batang sebanyak 56 kg (Lipsus Kumparan, 2024). Abdul Qohar selaku Direktur Penyidik Jampidsus Kejagung mengaku kaget mendapati ditemukan banyak uang tunai dikediaman Zarof Ricar. Dalam pengeledahan tempat tinggal Zarof Ricar, kejagung tidak hanya menyita harta kekayaan milik Zarof Ricar tapi juga memblokir seluruh rekening bank yang dimilikinya. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kejagung soal berasal darimana saja harta tak terduga yang dimiliki oleh Zarof Ricar, Zarof mengaku lupa kasus apa saja yang telah ia tangani yang menghasilkan banyak gratifikasi dan suap (MetroTV, 2024). Direktur Penyidik Jampidsus Kejagung menyatakan kalau penyelidikan pasti akan tetap terus dilakukan, dan penyidik akan terus berusaha menggali terkait darimana saja hasil harta kekayaan yang didapat oleh Zarof Ricar (MetroTV, 2024).

Kasus suap lain yang dianalisis oleh penulis adalah kasus suap yang terjadi pada Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan bersama-sama dengan mantan Komisaris Independen Wijaya Karya (Wika) Beton Dadan Tri Yudianto yang didakwa menerima suap senilai Rp11,2 miliar terkait pengurusan perkara di MA. Suap diberikan oleh Debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Heryanto Tanaka. Suap dimaksud agar Hasbi mengupayakan pengurusan perkara kasasi Nomor: 326K/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman dapat dikabulkan oleh hakim agung yang memeriksa dan mengadili perkara serta agar perkara kepailitan KSP Intidana yang beproses di MA dapat diputus sesuai keinginan Heryanto. Pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Budiman divonis bebas. Namun, di tingkat kasasi, atas pengaruh Hasbi, Budiman divonis dengan pidana lima tahun penjara. Hakim agung nonaktif Gazalba Saleh yang juga diproses hukum KPK atas kasus serupa menjadi salah satu majelis hakim yang mengadili perkara Budiman di tingkat kasasi tersebut. Gazalba kini sudah bebas. Tindak pidana dilakukan Hasbi dan Dadan pada periode Februari-September 2022 di Setiabudi One, Rasuna Said, Jakarta

Selatan; Kantor MA, Jakarta Pusat; Bank BCA KCP Graha Paramitha, Jakarta Selatan; Rumah Pancasila, Semarang, Jawa Tengah; di Holliday Restaurant, Jalan Pandanaran, Semarang; PT Taruna Kusuma.

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan bersama-sama dengan mantan Komisaris Independen Wijaya Karya (Wika) Beton Dadan Tri Yudianto didakwa menerima suap senilai Rp11,2 miliar terkait pengurusan perkara di MA. “Terdakwa Hasbi Hasan bersama-sama dengan Dadan Tri Yudianto telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, menerima hadiah berupa uang keseluruhan sejumlah Rp11,2 miliar,” ujar jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2024). Sidang Suap Perkara MA, Hasbi Hasan Terima 3 Tas Mewah dan uang senilai Rp5 M Suap diberikan oleh Debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Heryanto Tanaka. Suap dimaksud agar Hasbi mengupayakan pengurusan perkara kasasi Nomor: 326K/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman dapat dikabulkan oleh hakim agung yang memeriksa dan mengadili perkara serta agar perkara kepailitan KSP Intidana yang beproses di MA dapat diputus sesuai keinginan Heryanto. Pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Budiman divonis bebas. Namun, di tingkat kasasi, atas pengaruh Hasbi, Budiman divonis dengan pidana lima tahun penjara. Hakim agung nonaktif Gazalba Saleh yang juga diproses hukum KPK atas kasus serupa menjadi salah satu majelis hakim yang mengadili perkara Budiman di tingkat kasasi tersebut. Gazalba kini sudah bebas. Tindak pidana yang dilakukan Hasbi dan Dadan pada periode Februari-September 2022 di Setiabudi One, Rasuna Said, Jakarta Selatan; Kantor MA, Jakarta Pusat; Bank BCA KCP Graha Paramitha, Jakarta Selatan; Rumah Pancasila, Semarang, Jawa Tengah; di Holliday Restaurant, Jalan Pandanaran, Semarang; PT Taruna Kusuma Purinusa, Semarang. KPK: Gazalba Terima Gratifikasi saat Urus Perkara Kasasi Edhy Prabowo.

Hasbi didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Selain itu, Hasbi juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang, fasilitas perjalanan wisata dan penginapan yang seluruhnya senilai Rp630.844.400 dari Devi Herlina, Yudi Noviantri dan Menas Erwin Djohansyah. Penerimaan gratifikasi itu berlangsung pada Januari 2021 sampai dengan Februari 2022 di Urban Air, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung; Kantor MA; Fraser Menteng Jakarta; The Hermitage Hotel Menteng; dan Novotel Cikini, Jakarta Pusat. Dalam hal ini, Hasbi didakwa melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 65 ayat 1 KUHP (CNN Indonesia, 2023).

Kasus suap terakhir yang di analisis oleh penulis adalah kasus seorang Bupati Bogor. Kasus dugaan suap yang di lakukan oleh bupati Bogor Ade Yasin adalah contoh kegagalan dalam proses kaderisasi politik. Korupsi kepala daerah yang terjadi berulang kali harus membuat Partai Politik membenahi diri. Ini menunjukkan bahwa kurangnya penegasan dalam melakukan fungsi kaderisasi anggota. Saat ini Ade Yasin mengenakan rompi tahanan warna oranye Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis 28 April 2022 yang bertempat di Gedung Merah Putih KPK Jakarta (Helmi Fithriansyah, 2022). Ade Yasin dan bersama 7 tersangka lainnya terjerat dalam kasus suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat (Helmi Fithriansyah, 2022). KPK menemukan adanya bukti permulaan untuk penetapan tersangka. Sebelumnya, KPK menggelar OTT di sejumlah tempat di Bogor dan Bandung dan di dalam OTT KPK sejak tanggal 26-27 April 2022 KPK mengamankan 12 orang termasuk Bupati Ade Yasin (Helmi Fithriansyah, 2022). KPK juga menyita uang sejumlah RP 1,024 Milliar yang di duga untuk menyuap 4 pegawai BPK supaya mendapatkan predikat audit Wajar Tanpa Pengecualian dan ketiganya turut menjadi

tersangka (Cantika Adinda, 2022). Dan sebanyak 4 pegawai BPK yang menjadi tersangka penerima suap. Tersangka beserta barang bukti kemudian di bawa ke Gedung KPK di Jakarta untuk menindak lanjuti pemeriksaan hingga akhirnya Bupati Ade Yasin beserta 7 orang di jadikan tersangka. Dia juga mengikuti jejak kakaknya, Rachmat Yasin yang merupakan kader partai berlambang Ka'bah itu. Rachmat Yasin juga terpidana dua kasus korupsi yaitu suap tukar menukar Kawasan hutan PT Bukit Jonggol Asri dengan vonis penjara selama 5 tahun 6 bulan (Aryo Putranto, 2022). Rachmat juga di jatuhi pidana denda sebesar RP 300 juta atau subsider tiga bulan penjara. Dia juga di kenai hukuman tambahan pencabutan hak di pilih selama dua tahun. Selain itu, Rachmat juga terbukti melakukan gratifikasi untuk kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada 2013 dan pemilu 2014 Kabupaten Bogor dengan total sekitar RP 8,9 miliar. Dalam perkara ini hakim menjatuhkan hukuman vonis 2 tahun 8 bulan penjara serta pidana denda sebesar RP 200 juta dan 2 bulan penjara (Wisma Putra, 2022). Ade Yasin sendiri difatwa telah melanggar Pasal 55 ayat 1 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP (Wisma Putra, 2022). Egi mengingatkan soal kerugian dalam hal politik dinasti seperti yang terjadi di kabupaten Bogor. Menurut dia Masyarakat harus menyadari sifat dari politik dinasti adalah untuk berkuasa dan melayani diri sendiri. Sehingga bagaimana cara untuk kepentingan publik di pinggirkan. Dampaknya praktik-praktik koruptif akan terjadi lagi.” Ujar Egi. Di sisi lain, menurut Egi praktik korupsi yang di lakukan oleh kepala daerah di akibatkan oleh pemilihan umum yang berbiaya tinggi (Aryo Putranto, 2022). Hal itu membuat kepala daerah terdorong melakukan praktik koruptif agar bisa di gunakan untuk memberi mahar pada parpol, jual beli suara, kampanye dalam dalam pilkada. Atas hal itu, Ade Yasin di ajukan ke pengadilan. Anehnya jaksa KPK hanya menuntut Ade Yasin selama tiga tahun penjara. Akhirnya pengadilan Negeri (PN) Bandung menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada Ade Yasin. Simpatisan Ade Yasin yang hadir menyaksikan persidangan kecewa atas vonis yang telah di jatuhkan oleh majelis hakim.

Solusi penegakan hukum bagi pelaku suap adalah dalam ayat 1 dalam Pasal 55 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji sebagai mana yang dimaksud dalam huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (Fatimah, Berliana A, Mirza N, 2024).

SIMPULAN

Zarof Ricar yang merupakan seorang mantan Mahkamah Agung yang seusai menjabat sebagai MA masih menjadi makelar suap vonis bebas dalam kasus seorang pengusaha yang menganiaya kekasihnya sendiri (Kiki Saputri & Ihsanuddin, 2024). Fokus utama kasus ini berawal dari klien makelar suap Zarof Ricar yang merupakan anak seorang mantan anggota komisi IV DPR RI yaitu Gregorius Ronald Tannur yang menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan kekasihnya pada Oktober 2023 lalu (Muhammad Zaenuddin, 2024). Setelah

kasus ini ditangani dan hakim sempat memberi putusan vonis bebas pada Ronald Tannur (Zunita Putri, 2024), putusan ini mendapatkan bantahan dari keluarga korban karena merasa dirugikan oleh hakim PN Surabaya yang tidak dapat memberi keadilan. Diketahui bahwasannya terdapat praktek suap yang dilakukan oleh pihak keluarga tersangka kepada hakim yang menjadi sorotan Kejagung hingga Kejagung menetapkan hakim sebagai tersangka (Zunita Putri, 2024). Berawal dari sinilah fokus kejagung teralihkan pada praktek suap yang terjadi antara keluarga tersangka, hakim, dan beberapa individu lainnya. Setelah kasus ini ditangani dan hakim sempat memberi putusan vonis bebas pada Ronald Tannur (Zunita Putri, 2024), putusan ini mendapatkan bantahan dari keluarga korban karena merasa dirugikan oleh hakim PN Surabaya yang tidak dapat memberi keadilan. Diketahui bahwasannya terdapat praktek suap yang dilakukan oleh pihak keluarga tersangka kepada hakim yang menjadi sorotan Kejagung hingga Kejagung menetapkan hakim sebagai tersangka (Zunita Putri, 2024). Berawal dari sinilah fokus kejagung teralihkan pada praktek suap yang terjadi antara keluarga tersangka, hakim, dan beberapa individu lainnya.

Molaritas praktisi hukum ini tercermin dalam asas-asas hukum. Sedangkan praktisi hukum di Indonesia tidak ber molaritas karena disamping para pelaku suap tersebut melakukan suap yang merugikan negara juga tidak mencerminkan asas-asas hukum. Disadari bahwa upaya menegakkan hukum tidaklah mudah. Krisis Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bukan berarti Menghilangkan upaya berbenah diri bagi lembaga-lembaga hukum yang ada. Setidaknya ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh para penegak hukum: Pertama, evaluasi berkesinambungan atas semua program dan kebijaksanaan yang sudah Dicanangkan, agar dapat mengurangi kendala yang dihadapi. Kedua, klarifikasi kasuskasus besar yang diputuskan oleh pengadilan, sehingga masyarakat mengetahui Secara jelas pertimbangan hukum dan dasar-dasar hukum yang digunakan. Ketiga, Adalah reorientasi visi dan misi lembaga penegak hukum agar mengutamakan Keadilan substansial. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum mutlak diperlukan. Globalisasi dengan perubahan sosial yang begitu cepat, menuntut aparat penegak hukum harus tanggap dan melakukan penyesuaian diri dengan peningkatan profesionalitasnya.

Kasus dugaan suap yang di lakukan oleh bupati Bogor Ade Yasin adalah contoh kegagalan dalam proses kaderisasi politik. Korupsi kepala daerah yang terjadi berulang kali harus membuat Partai Politik membenahi diri. Ini menunjukkan bahwa kurangnya penegasan dalam melakukan fungsi kaderisasi anggota. Ade Yasin dan bersama 7 tersangka lainnya terjerat dalam kasus suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat. KPK menemukan adanya bukti permulaan untuk penetapan tersangka. KPK juga menyita uang sejumlah RP 1,024 Milliar yang di duga untuk menyuap 4 pegawai BPK supaya mendapatkan predikat audit Wajar Tanpa Pengecualian dan ketiganya turut menjadi tersangka. Dan sebanyak 4 pegawai BPK yang menjadi tersangka penerima suap. Tersangka beserta barang bukti kemudian di bawa ke Gedung KPK di Jakarta untuk menindak lanjuti pemeriksaan hingga akhirnya Bupati Ade Yasin beserta 7 orang di jadikan tersangka. Rachmat juga di jatuhi pidana denda sebesar RP 300 juta atau subsider tiga bulan penjara. Dia juga di kenai hukuman tambahan pencabutan hak di pilih selama dua tahun. Selain itu, Rachmat juga terbukti melakukan gratifikasi untuk kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada 2013 dan pemilu 2014 Kabupaten Bogor dengan total sekitar RP 8,9 miliar. Dalam perkara ini hakim menjatuhkan hukuman vonis 2 tahun 8 bulan penjara serta pidana denda sebesar RP 200 juta dan 2 bulan penjara. Egi mengingatkan soal kerugian dalam hal politik dinasti seperti yang terjadi di kabupaten Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Kompas.com. (2024). Eks Pejabat MA Zarof Ricar Akui Dapat Perkar. <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/06/16251421/eks-pejabat-ma-zarof-ricar-akui-dapat-rp-1-triliun-dari-hasil-urus-perkara>
- Detik.com. (2024). KY Asumsikan Makelar Ronald Tannur Raup Rp 1T 1.000 Kasus, Ini Kata MA. https://news.detik.com/berita/d-7644203/ky-asumsikan-makelar-ronald-tannur-raup-rp-1-t-dari-1-000-kasus-ini-kata-ma?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news
- Detiknews. (2024) Siapa Penyeter dan Hakim Penerima Uang dari Zarof Ricar? Ini Kata Kejagung. https://news.detik.com/berita/d-7640128/siapa-penyeter-dan-hakim-penerima-uang-dari-zarof-ricar-ini-kata-kejagung?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news
- Detiknews. (2024). Kata Jaksa Agung soal Gepokan Duit dan Catatan Nama di Kasus Suap Hakim. https://news.detik.com/berita/d-7636980/kata-jaksa-agung-soal-gepokan-duit-dan-catatan-nama-di-kasus-suap-hakim?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news
- Republika. (2024). Zarof Ricar Diminta Dijaga Agar tidak Dibunuh Mafia Peradilan di MA. <https://news.republika.co.id/berita/smpvud318/zarof-ricar-diminta-dijaga-agar-tidak-dibunuh-mafia-peradilan-di-ma>
- BBC NEWS INDONESIA. (2024). Bagaimana membongkar dugaan aliran dana Rp 1 triliun 'makelar kasus' Zarof Ricar?. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c624xzp36g2o>
- Kompas.com. (2022). Kasus Suap Bupati Bogor Ade Yasin, Noda Politik Dinasti dan Kaderisasi Parpol. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/14332181/kasus-suap-bupati-bogor-ade-yasin-noda-politik-dinasti-dan-kaderisasi-parpol>
- Kompas.com. (2024). MA Ungkap Cara Makelar Kasus Zarof Ricar Dekati Hakim Kasasi Ronald Tannur. <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/18/11400511/ma-ungkap-cara-makelar-kasus-zarof-ricar-dekati-hakim-kasasi-ronald-tannur>
- Tempo. (2024). Profil Edward Tannur, Ayah Robald Tannur yang Dinonaktifkan sebagai Anggota DPR dan PKB. <https://www.tempo.co/hukum/profil-edward-tannur-ayah-ronald-tannur-yang-dinonaktifkan-sebagai-anggota-dpr-dan-pkb--33767>
- Detiknews. (2022). Menyuaup Rp. 1,9 Miliar Demi WTP Ade Yasin Dituntut 3 Tahun Penjara. <https://news.detik.com/berita/d-6286904/menyuaup-rp-1-9-m-demi-wtp-ade-yasin-dituntut-3-tahun-penjara>
- CNBC INDONESIA. (2022). Bupati Bogor Ade Yasin Jadi Tersangka gegara Suap Auditor BPK. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220428050044-4-335537/bupati-bogor-ade-yasin-jadi-tersangka-gegara-suap-auditor-bpk>
- Detiknews. (2023). Suap Pegawai BPK Bupati Bogor Ade Yasin Tetap di Bui 4 Tahun di MA. <https://news.detik.com/berita/d-6609477/suap-pegawai-bpk-bupati-bogor-ade-yasin-tetap-dibui-4-tahun-di-ma>
- liputan6.com. (2022). Infografis Bupati Bogor Ade Yasin Terjerat Kasus Suap. <https://www.liputan6.com/news/read/4951490/infografis-bupati-bogor-ade-yasin-terjerat-kasus-suap>
- Kompas.com. (2022). Kasus Suap Bupati Bogor Ade Yasin, Noda Politik Dinasti dan Kaderisasi Parpol. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/14332181/kasus-suap-bupati-bogor-ade-yasin-noda-politik-dinasti-dan-kaderisasi-parpol>
- GRC Indonesia. (2024). Membongkar Praktik Suap: Faktor Penyebab dan Pencegahannya. <https://grc-indonesia.com/membongkar-praktik-suap-faktor-penyebab-dan-pencegahannya>
- Mustofa M. (2013). SUAP MENYUAP DAN MAFIA PERADILAN DI INDONESIA: TELAAH KRIMINOLOGIS, 42 (1), 1-5. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5854>
- Hira H, Savira Y, Tresia Y. (2021). Pemberantasan Tindak Pidana Suap Disektor Pertambangan Melalui Penguatan Kerja Sama Lembaga Penegak Hukum di Indonesia. *Jurnal Anti Korupsi*,

- 3 (2), 1-20. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAK/article/view/32300>
- Ridho M Iswardhana. (2023). Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Keadilan Sosial. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7 (1), 1080-1090. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5180>
- Fatimatuz Zahro, Berliana Ananta, Mirza Putri. (2024). Peran Hukum Dalam Kasus Suap Menyuap Yang Terjadi Di Keolahragaan Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, dan Hukum Indonesia*, 1 (2), 173-181. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/download/155/172/730>
- Ahmad F A H D Budi Suryanto. (2021). PENEGAKAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP MENYUAP DAN GRATIFIKASI DI INDONESIA. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1 (2), 589-600. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss2/4/>
- Gramedia Literasi. (2019). Penelitian Kualitatif: Pengertian Ciri-Ciri Tujuan Jenis Dan Prosedurnya. <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/?srsId=AfmBOoqT3g4KvRX8TYnYdIMEYNy7KdPAkn3GR2sG6mFTEBXZlbiAyxge>
- J Nabel A P, M Ali Mutawakkil. (2020). Qada' Dan Qadar Perspektif Al-Qur'an Hadits dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7 (1), 61-71. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jpai/article/view/11232>.